

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Pada penelitian kali ini penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi PBBKB terhadap PAD pada UPT PPD Surabaya Utara, untuk memenuhi tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan membandingkan peraturan yang berlaku dengan implementasi yang ada pada UPT PPD Surabaya Utara mengenai pemungutan PBBKB, serta menganalisis tingkat kontribusi PBBKB terhadap PAD pada UPT PPD Surabaya Utara. Kesimpulan yang dapat penulis ungkapkan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya meliputi beberapa aspek diantaranya :

1. Implementasi dari proses pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan.
2. Wajib Pungut (Wapu) sudah melakukan perhitungan dan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
3. Penerimaan PBBKB dari tahun ke tahun selalu melebihi target, hanya saja pada tahun 2015 realisasi yang diperoleh tidak memenuhi target. Sejak tahun 2016 terdapat penurunan target serta realisasi dari tahun sebelumnya hal

tersebut tidak mempengaruhi penerimaan PBBKB yang tetap memenuhi target yang telah ditetapkan. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya beberapa Wapu yang telah berhenti beroperasi mengakibatkan pendapatan PBBKB pada tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami penurunan yang cukup banyak.

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat kurang berkontribusi terhadap Pajak Asli Daerah pada UPT PPD Surabaya Utara. Hal tersebut terlihat dari perhitungan kontribusi PBBK terhadap PAD pada tahun 2014 sebesar 10,9%, Tahun 2015 sebesar 10,7%, Tahun 2016 sebesar 9,4%, Tahun 2017 sebesar 9,1%, dan Tahun 2018 sebesar 8,2%.

## **5.2 Saran dan Implikasi Penelitian**

Saran bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang membahas mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diharapkan untuk menganalisis serta meneliti sistem pemungutan serta pencatatan akuntansinya baik pada instansi yang sama maupun pada perusahaan yang lain sehingga memperbanyak referensi bagi penulis – penulis selanjutnya yang ingin mengambil topik Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Implikasi penelitian yang dapat diberikan yaitu sebaiknya UPT PPD Surabaya Utara dapat meningkatkan penerimaan PBBKB dengan cara selalu melakukan monitoring terhadap wajib pungut, dan rutin melakukan penagihan terhadap wajib pungut agar dapat meningkatkan tingkat penerimaan PBBKB serta tercapainya realisasi PBBKB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 10*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jakarta, P. D. (n.d.). *Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)*. Retrieved 7 21, 2020, from Pajak dan Retribusi Daerah: <https://bprd.jakarta.go.id/pbb-kb/>
- Jatim, P. (2010). *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*. Surabaya : JDIH Pemprov Jatim.
- Jatim, P. (2010). *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 31 - 33*. Surabaya: JDIH Pemprov Jatim.
- Jatim, P. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 27*. Surabaya: JDIH Pemprov Jatim.
- Jatim, P. (2010). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 tahun 2010 Tentang pajak Daerah*. Surabaya : JDIH Pemprov Jatim.
- Jatim, P. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: JDIH Pemprov Jatim.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Maulida, R. (2018, 9 28). *Online Pajak*. Retrieved 7 10, 2020, from Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia: <https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>
- Maulida, R. (2018, September 6). *Online Pajak*. Retrieved Mei 19, 2020, from pajak daerah: Pengertian, Ciri-ciri, Jenis dan tarifnya: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jenis+pajak+provinsi+dan+pajak+kabupaten>

Sari, Y. A. (2010). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja* , 179.

Suandy. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

